

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolyn. (2010), *Ekonomi Pembangunan Edisi -5*, Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta.
- Adisasmita. H.R., 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu, Jakarta.
- BPS Kalimantan Barat, *Kalimantan Barat Dalam Angka 2005-2012*.
- Dewi, Elsa Kumala, Mondra Neldi SE,MM, Roni Andri Wijaya SE,MM , 2013, *“Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kota Bukit Tinggi”*, Jurnal Akutansi
- Deaos.com
- djpk.depkeu.go.id
- Haryanto.2005. *Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analisis*. Jurnal Departemen Keuangan.
- Mankiw, N Gregory. 2006. *“Principle of Economics Pengantar Ekonomi Makro”*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mantra, I.B. 2000, *“Demografi Umum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Masyhuri. 2010, *Analisis Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin*, Yogyakarta, Tesis Ilmu Ekonomi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prakoso. 2005. *“Pajak dan Retribusi Daerah”*. Yogyakarta. UII Press
- Santosa, Purbayu Budi and Rahayu (2005). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), Volume 2 (Nomor 1). pp. 9-18. ISSN 1829-7617
- Sukirno, Sadono. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematikadan Pendekatan*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

Suryono, Wiratno Bagus, 2010. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah*. Skripsi Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang,

Tarigan, R. (2006), *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonomi teori dan aplikasi untuk ekonomi dan Bisnis edisi ke dua*. Yogyakarta : Ekonisia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah